

MANAJEMEN KONFLIK PADA MASYARAKAT DI ERA GLOBAL¹

I Ketut Ardhana²
Phjepdrlipi@Yahoo.Com
Universitas Udayana Denpasar

Abstrak

Tahun 2018 adalah tahun politik. Diperlukan kesiapan untuk mengatasi berbagai permasalahan social budaya, ekonomi dan politik yang cenderung menguat menjelang hingga selesainya tahun politik ini. Di satu pihak proses demokratisasi hendaknya dibiarkan berjalan sesuai dinamika zamannya, namun di pihak yang lainnya upaya cerdas dalam mengantisipasinya perlu dipikirkan dengan baik, sehingga diperlukan upaya manajemen konflik yang memiliki wawasan kebangsaan berdasarkan pengalaman kesejarahan masa lalu. Tulisan ini membahas bagaimana riak-riak yang terjadi di masa lalu, yang dapat dipergunakan sebagai bekal dalam menghadapi masa sekarang menuju pembangunan demokrasi masyarakat yang dewasa cerdas. Dengan ini tentu pembangunan demokratisasi masyarakat Indonesia diharapkan berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat luar terlebih-lebih akan mengarah pada proses disintegrasi.

Kata kunci: tahun politik, pilkada, konflik dan manajemen konflik

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi persoalan konflik tidak dapat dihindari. Untuk itu, masyarakat diharapkan secara cerdas dalam menyikapi setiap persoalan konflik di masyarakat. Terlebih-lebih di tahun Pilkada tahun 2018. Masyarakat akan dapat menyelesaikan persoalan politik domestiknya, jika pengaruh global muncul, sementara masyarakat akan mengalami permasalahan konflik secara berkelanjutan, jika tidak ada muncul pengaruh luar. Masalah ini biasa dibahas dalam dunia politik terlebih-lebih di dunia ketiga yang sangat rentan akan mengalami masalah konflik berkepanjangan. Lihat saja misalnya pada kasus di Suriah, negara yang terkenal akan cerita dongengnya yang kaya akan kearifan-kearifan lokalnya di masa lalu. Akan tetapi, akibat bencana perang di negeri Arab yang berkepanjangan menyebabkan masuknya intervensi asing dan tidak tanggung-tanggung diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk merenovasi keadaan dan diperlukan bantuan pembangunan triliunan rupiah dari berbagai negara termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kisah yang dialami oleh Suriah sebenarnya menghadirkan berbagai kepentingan antara dunia Arab dan dunia Barat. Memang semenjak jatuhnya komunisme, maka yang dianggap musuh paling berat bagi Dunia Barat adalah Islam. Islam tentu tidak diartikan sebagai ideologi agama, tetapi sebagai sebuah ideologi politik. Memang sulit memisahkan antara kedua konsep ideologi yang saling tumpang tindih ini dalam pemikiran dunia Islam. Oleh karena itu, di negara-negara yang pernah dikolonisasi oleh Barat, Islam sebagai sebuah ideologi selalu muncul ke permukaan dalam merebut kemerdekaan. Lihat misalnya dalam perang Aceh yang berlangsung cukup lama (1899-1917) dan menelan korban jiwa yang banyak. Belanda pun kewalahan dalam mencari solusi terhadap perang yang dianggap menelan banyak korban jiwa itu, baik di kalangan Belanda, maupun di kalangan tentara Aceh. Tidak mengherankan juga, jika arsitek kolonial Belanda C. Snouck Hurgronje menikah dengan gadis Aceh untuk dapat mengetahui kehebatan ideologi Islam yang mampu menghadang kekuatan Belanda di Aceh. Melalui pernikahannya inilah, Snouck berusaha keras mempelajari ayat-ayat yang memungkinkan tentara Aceh berjibaku dengan semangat perang Sabil terjun di medan konflik yang berkepanjangan dan akhirnya di medan pertempuran yang tercatat sangat penting dalam manajemen pengelolaan wilayah Indonesia yang kemudian berada di bawah kekuasaan Belanda.

Tidak berhenti sampai di situ, Belanda pun menghadapi kekuatan lasjkar Bali yang dikenal sebagai Puputan yang terjadi pada tahun 1906. Ada persamaan yang dapat dilihat antara konflik Aceh dan konflik Belanda dengan lasjkar Bali dalam konteks puputan itu. Di antaranya adalah kemampuan keduanya baik di Aceh, maupun di Bali, untuk mengangkat ideologi agama, ke dalam ideologi politik. Siapa yang menjalankan kebenaran Tuhan akan mencapai surga, walaupun dengan

¹ Artikel ini pernah disampaikan pada Kuliah Umum dengan tema, "Resolusi Konflik di Tahun Politik", yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa di Gedung Sri Kesari Warmadewa Mandapa pada Kamis, 8 Maret 2018 dan telah di revisi sesuai keperluan.

² Guru Besar Sejarah Asia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

titik darah penghabisan. Demikianlah ideologi agama dimunculkan ke permukaan untuk menggalang kekuatan terhadap kelompok yang dianggap menentangnya.

II. Perspektif Konflik Masa Lalu

Dengan ideologi agama yang diangkat ke ranah politik, menyebabkan Belanda mempelajari secara seksama tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat Timur. Sebelum memahami dinamika tersebut, Belanda menerapkan politik menurut persepsi yang dianggap menguntungkannya berdasarkan pengalaman yang cukup lama dalam masalah manajemen konflik di Eropa. Ini berkaitan dengan pengalamannya mengelola konflik ketika benua Afrika mulai dibagi-bagi di antara kapitalis Barat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan berbekal rasionalisme yang berkembang sejak zaman Renaissance, negara-negara Barat pun berlomba-lomba untuk mencari daerah jajahan baru dengan menekan masyarakat Afrika yang masih kuat dengan ikatan-ikatan primordialismenya.

Negara-negara Barat menganggap bahwa keikutsertaannya dalam mengatasi masalah konflik di negara-negara tersebut karena diminta oleh penguasa-penguasa lokal yang meminta bantuan agar mereka terlepas dari berbagai mamalah konflik. Dari sudut pandang ini, Barat menerapkan politik *pheriphery* yaitu yang berasal dari daerah pinggiran dan bukan dari pusat kekuasaan Belanda. Dengan berdasarkan pemikiran ini, Barat terutama Inggris yang merasa berkewajiban untuk membantu terhadap masyarakat lokal dari perseteruan konflik yang berkepanjangan.

Sementara itu, Belanda merasa perlu menerapkan politik yang bersifat tidak langsung dan informal, bila dimungkinkan, dan menerapkan politik direk dan formal, apabila diperlukan. Artinya hubungan yang bersifat tidak langsung dan tidak formal ditempuh lebih dahulu, jika menghadapi permasalahan yang tidak memberikan solusi maka Belanda tidak tanggung-tanggung untuk melaksanakan politik yang bersifat langsung dan formal. Dan menurut Belanda, yang membedakan antara penguasa kolonial Barat lainnya dengan penguasa kolonial adalah karena Belanda melaksanakan politik *ethis (ethische politiek)*, sehingga Belanda merasa memiliki kewajiban moral atau hutang budi yang harus dibayar oleh penjajah Belanda terhadap penduduk yang dijajahnya. Inilah yang memungkinkan penduduk Indonesia mendapat pendidikan yang sebenarnya keinginan awal Belanda untuk memperoleh tenaga sumber daya manusia yang profesional dan mengetahui tataran birokrasi pemerintah Belanda. Caranya dengan memberikan pendidikan Barat Namun, tampaknya hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi penduduk lokal untuk menjadi bangsa yang cerdas, dimana diberikan pelajaran tentang Barat dan Bahasa Belanda bagi anak-anak bangsawan dan orang Timur Asing (*Vreemde Osterlingen*), sehingga mereka memungkinkan untuk merebut kemerdekaannya dari penguasa kolonial.

III. Manajemen Konflik, Ikatan Primordialisme dan Nasionalisme di Era Global

Sejarah mencatat bahwa komunitas yang bedasarkan agama memberikan kontribusi bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat ketika nasionalisme berupaya untuk mengintegrasikan kepercayaan setiap individu dari komunitas itu kepada paham kebangsaan. Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa dalam konsep mengimplementasikan ideologi nasionalisme itu tanpa rintangan. Memang dalam mengelola konflik antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya dimunculkan istilah *co* atau *cooperative* dan *non-co* atau *non cooperative*. Sejak awal masa pergerakan yaitu setelah pelaksanaan politik etis tahun 1901 dan dimulainya berdirinya gerakan Budi Utomo tahun 1908, telah muncul beberapa konflik kepentingan, meskipun pada akhirnya konflik-konflik itu diselesaikan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada satu catatan penting yang berkaitan dengan Budi Utomo karena awalnya dikedepankan upaya untuk memajukan kebudayaan Jawa. Lebih ditekankan pada kata kebudayaan untuk menghindari perhatian Belanda yang mencurigai setiap gerakan pemuda pada masa pergerakan.

Namun demikian, ikatan-ikatan primordialisme yang ada pada budaya masyarakat pada saat itu, tampaknya sulit ditinggalkan. Di sinilah mengapa konflik-konflik yang berkepanjangan masih berlangsung hingga, awal-awal kemerdekaan. Kondisi budaya masyarakat yang demikian, bukannya tanpa resiko, karena ketika masa okupasi Jepang misalnya, tetap memanfaatkan ikatan-ikatan primordial yang sudah ada. Jepang menyadari akan dinamika politik yang berlangsung, sehingga mengapa kemudian penyerahan kekuasaan dari Jepang ke pemuda tampaknya tidak dilaksanakan secara langsung. Sementara itu, konflik-konflik masih berlangsung sehingga apa yang diharapkan terjadi tidak dapat berjalan dengan lancar. Hingga kemudian sama halnya dengan Belanda, Jepang pun menerapkan *pasal pasal karet* yang ditujukan kepada pemuda pejuang. Manajemen pengelolaan konflik yang dilakukan ini tampaknya memberikan hasil bagi penguasa kolonial.

Di era revolusi (1945—1950) konflik-konflik politik masih berlangsung dengan kuat, sehingga mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa yang sudah diproklamasikan pada tahun 1945. Gerakan-gerakan yang berlandaskan ada agama, nasionalisme, dan komunisme berlangsung kuat. Ini adalah situasi politik yang sangat mengkhawatirkan, karena Indonesia terpecah menjadi beberapa negara bagian seperti munculnya Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan gerakan komunisme, memang pada masa awal pergerakan sudah ada partai Komunis Indonesia yang didirikan pada tahun 1921. Namun, hakekat partai itu adalah menentang pemerintah kolonial Belanda. Konflik kepentingan yang terjadi juga tidak dapat dihindari. Bahkan, gerakan komunisme mencapai puncaknya pada tahun 1948. Di sini tampaknya komunisme menjadi lawan dari gerakan-gerakan Islam, sehingga polarisasi politik yang terjadi sekitar 20 tahun kemudian lebih banyak diwarnai oleh konflik-konflik antara agama, komunisme, dan nasionalisme.

Tiap daerah di Indonesia memiliki kekhasannya sendiri dalam mengelola konflik-konflik yang berkepanjangan di era setelah masa revolusi. Dalam kaitannya dengan ideology komunis, agama, dan nasionalisme tampaknya konflik-konflik di Jawa tidak separah di Bali. Di Bali, akibat konflik-konflik itu menyebabkan banyaknya jatuh korban, karena masalah konflik politik dikaitkan dengan masalah agama. Seperti adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa kalau gerakan komunis yang menang, maka semua bangunan suci Hindu akan dihancurkan. Provokasi dan slogan-slogan anti agama ini menyebabkan mengapa peristiwa konflik komunis dan non komunis lebih banyak dan parah terjadi di Bali, dibandingkan dengan kejadian konflik di Jawa. Di Bali, misalnya lebih dari 100.000 korban gerakan komunis yang berjatuh, dan ini tampaknya menyisakan trauma yang mendalam di kalangan para kelompok yang bertikai. Di Jawa, khususnya di Jawa Timur seperti di Kediri misalnya konflik yang terjadi tidak separah yang terjadi di Bali. Di Kediri Jawa Timur misalnya, bagi anggota komunis yang dapat menyelamatkan diri ke kampung Kristen, biasanya terselamatkan dibandingkan mengungsi ke kampung lainnya. Ini adalah contoh yang menarik bagaimana sikap memanusiaikan manusia (ngewongke wong) tampaknya berlaku di daerah-daerah kampung Kristen, sehingga para korban yang terselamatkan itu dapat menajutkan kehidupannya hingga sekarang.

Meskipun demikian, pertanyaan utama yang perlu dibahas adalah mengapa bangsa yang menjunjung tinggi akan kebesaran Tuhan mengakibatkan begitu banyaknya berjatuh korban jiwa? Di sinilah arti pentingnya memaknai peristiwa sejarah untuk terjadi berulang lagi. Kearifan-kearifan lokal yang hendak dapat digali, sehingga masyarakat menjadi cerdas dalam berpolitik yang biasanya untuk kepentingan sesaat.

Masyarakat hendaknya memahami dan menghayati makna setiap ideologi yang dikontestasi dan dipertarungkan. Bagi masyarakat yang cerdas tentunya tidak akan terjebak dengan ideologi-ideologi yang mengaitkan antara politik dan agama. Pada gilirannya bahwa masyarakat itu sendiri yang mengalami kerugian akibat pertikaian dan konflik yang berkepanjangan. Tentu sebelum hal ini terjadi lagi, hendaknya berbagai pihak, para stakeholders memahami hakekat perjuangan politik, sehingga hal-hal yang tidak perlu terjadi dapat dihindari.

IV. Prilaku Cerdas Menuju Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan

Tampaknya masyarakat Indonesia hendaknya sudah menjadi cerdas dalam menyikapi setiap aksi politik. Bagi ilmuwan politik perlu mempelajari apa yang sudah terjadi, karena pada dasarnya politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lalu. Kedua ilmuwan ini meski memiliki persepsi yang berbeda, namun memberikan keteladanan yang sama bagi generasi muda yang mau mempelajarinya. Kedua keilmuan ini saling melengkapi dan di sinilah pentingnya mempelajari masalah politik dan sejarah yang sangat penting dipahami dalam pengelolaan konflik (*conflict management*) yang terjadi di masyarakat.

Terlebih-lebih di era globalisasi sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Seringkali tanpa sadar sebenarnya masyarakat kita terjebak dengan ideologi-ideologi yang sedang berkembang yang sebenarnya tidak memiliki akar sejarah di tanah air. Ideologi terorisme misalnya sering menjadi masalah dan perluantisipasi semua pihak dalam menangani kasusnya. Pemaksaan kehendak, tampaknya sudah tidak zamannya lagi. Kita dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang multikultur yang bertentangan dengan kehidupan yang monokultur. Apabila disimak latar belakang sejarahnya memang setiap ideologi memiliki aspek kekerannya (criminalnya) ketika kehendak politik mau dipaksakan (*politic tends to corrupt*). Di sinilah masalahnya apabila kita tidak dapat mengendalikan maka akan dilakukan keinginan yang tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Islam di Indonesia misalnya adalah bukan Islam yang terrorist, tetapi Islam yang memiliki nilai-nilai demokrasi dan berbasis pada toleransi sebagaimana terjadi di Asia Tenggara pada

umumnya. Dalam hal ini Islam di Indonesia adalah Islam yang mencintai tradisi yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara adalah Islam yang beraliran madshab Syafei yaitu yang sangat toleran dengan tradisi setempat dimana ia mendatangnya. Tentu adanya pemahaman Islam seperti ini berbeda dengan pemahaman Islam di dunia Arab misalnya yang memiliki karakteristinya sendiri-sendiri. Jika semua sudah menyadari akan kebersamaan ini, tentunya semua kita akan tidak - menghadapi konflik sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Oleh karena itu, sudah tidak masanya lagi mempertentangkan berbagai aliran politik yang berbasis agama yang ada. Semua memiliki tujuan yang baik, tentu sikap masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, tradisi, sejarah, bahasa yang berbeda menghendaki sikap cerdas dalam melakukan perannya dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pimpinan partai, dan para *stakeholders* yang lainnya hendaknya memainkan perannya yang aktif dan proaktif, sehingga dalam setiap kontestasi politik sebagaimana yang terjadi di tahun politik 2018 ini, masing-masing kelompok komunitas masyarakat menyadari akan peran politiknya secara dewasa dan cerdas, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak diperlukan.

Demokrasi politik memang diperlukan, akan tetapi demokrasi spiritual yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat unggul dan berbudaya tentu lebih memiliki arti yang sangat penuh makna. Di sinilah perlunya pemahaman kita bersama dalam melihat setiap proses politik yang berlangsung. Dengan berbekal nilai-nilai kearifan lokal tentu akan menjadi sebuah keniscayaan sehingga kehidupan pembangunan politik masyarakat Indonesia yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

V. Simpulan

Dari uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lalu. Perlu belajar dari pengalaman masa lalu dalam mengantisipasi berbagai persoalan dalam tahun pilkada ini. Ini perlu disadari, bahwa konflik-konflik di akar rumput (*grass roots*) hendaknya dapat diantisipasi berdasarkan kearifan-kearifan yang ada di masyarakat. Semua komponen masyarakat, pemerintah daerah hendaknya mematuhi koridor masyarakat demokratis yang sudah ada, sehingga dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang bersifat multidimensi. Jika tidak, maka berbagai konflik yang sifatnya multidimensi dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebesaran hati, sikap yang cerdas, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, diupayakan akan dapat diantisipasi dengan baik, tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur, makna masyarakat demokratis yang dikembangkan sekarang ini.

Daftar Pustaka

Ardhana, I Ketut. 2016. "Religious Teachings on Sustainability in the Context of Hinduism in Bali", paper presented at the Asian Conference, A Call to Dialogue on the Sustainability of Life in the Asian Context, held by the JCAP (Jesuit Conference of Asia Pasific) at the University Sanata Dharma Yogyakarta, from August 8 to 10.

Ardhana, I Ketut and I Nyoman Wijaya. 2015a. "Indian Influences on Balinese Culture: The Role of Hinduism and Buddhism in Present Day Bali". Paper presented at the International Seminar on "Thai-India History and Cultural Relationship" Room 105, Mahachulalongkorn Building, Chulalongkorn University Organized by the Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, May 26-27.

Ardhana, I Ketut, I Ketut Setiawan, Sulanjari et al. 2015b. *Calonarang dalam Kebudayaan Bali*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar in cooperation with Pusat Kajian Bali Universitas Udayana.

Ardhana, I Ketut and I Ketut Setiawan 2014, *Raja Udayana Warmadewa*. Denpasar: Pemerintah Kabupaten Gianyar and Center for Bali Studies, Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana.

Ardhana. I Ketut. 2012a. "Cultural Relationships between India and Indonesia: Viewing from the Collective Memories". Paper presented at the India-ASEAN Academic Seminar on "India and Indonesia-Shared History & Culture and Opportunities for Deepening People to People Contacts held by Indian Embassy in Jakarta, Cultural Consulate of India in Denpasar and University of Udayana, in Denpasar Bali, 30 October.

Ardhana, I Ketut. 2012b, "Indian Influences on the Balinese Culture in the Context of Harmony and Human Securities", in *International Seminar on "Cultural Exchange between India and Southeast Asian World"*, held by Udayana University in cooperation with Global Association of Indo-Asean Studies and Hankuk University of Foreign Studies, Korea, Denpasar 8-9 February.

Ardhana, I Ketut. 2011. "Tourism and Community Security in Bali: A Social and Cultural Perspective". Paper presented in the Conference and General Assembly of IFSSO, "Social Science Perspectives on Human Security" in Lyceum of the Philippines University (LPU), Batangas City, the Philippines, November 8—11.

Ardhana, I Ketut. 1993. "Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes in Badung, South Bali 1906—1950". (Unpublished Master Thesis). Canberra-Australia: Faculty of Asian Studies-the Australian National University (ANU).

Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft 1915—1950*. Passau-Germany: Lehrstuhl für Sudostasienkunde.

Covarruvias, Miguel. 2012. "Persawahan di Bali", in Adrian Vickers. *Bali Tempo Doeloe*. Depok: Komunitas Bambu.

Covarruabias, Miguel. 1986. *Island of Bali*. London and New York: KPI.

Eiseman, Fred. B. Jr. 2000, *Bali: Skala and Niskala, Essays on Religion, Ritual and Art*. Periplus

Falyey, Lindsay. 2015. *Understanding Southeast Asia: Syncretism and Communalities*. Songkhla: Thailand: TSU Press.

Geriya, Wayan 2013, *Cetak Biru Revitalisasi Menuju Kabupaten Unggulan dalam Bidang Seni dan Budaya (Blueprint Revitalization of Gianyar Toward Regency Excellence in Arts and Culture)*. Denpasar, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar and Pusat Kajian Bali (Center for Bali Studies) Udayana University.

Gottowick, Volker. 2005. *Die Erfindung des Barong: Mythos, Ritual und Alterität auf Bali*. Berlin-Germany: Dietrich Reimer Verlag GmbH.

Gust, Heike, 1994. "Der Balinesische Hinduismus in Geschichte und Gegenwart", Master Unpublished Thesis. Passau: Universität Passau.

Heine-Geldern. 1956, *Conceptions of States and Kinship in Southeast Asia*, Ithaca-New York, Southeast Asia Program, Department of Asian Studies.

Kieven, Lydia. 2014. *Menelusuri Figur Bertopi dalam Relief Candi Zaman Majapahit: Pandangan Baru terhadap Fungsi Religius Candi-candi Periode Jawa Timur Abad ke-14 dan ke-15*. Jakarta: Ecole française d'Extreme-Orient Kepustakaan Populer Gramedia.

Nala, Ngurah. 2004. "Hindu Education in Bali", in Martin Ramstedt (ed). *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between local, national and global interests*. Routledge Curzon, Oxford.

Pink, Peter Wilhelm. 1993. *Wariga: Beiträge zur Balinesischen Divinatiosliteratur*. Berlin/ Hamburg: Dietrich Reiner Verlag.

Ramstedt, Martin. 2004. "Introduction: Negotiating Identities-Indonesia Hindus' between Local, National and Global Interest", in Martin Ramstedt (ed.), *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religion between local, national and global interests*. Routledge Curzon, Oxford.

Ramstedt, Martin. 1999. "Hinduismus und Naturkulte", in Bernhard Dahm und Roderich Ptak (eds.). *Sudostasien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur*. München: C.H. Beck Verlag.

Rema, Nyoman. April 2014, "Tradisi Pemujaan Leluhur Pada Masyarakat Hindu di Bali (Ancestor Worship Tradition at Hindu Society in Bali)," in *Seri Penerbitan Forum Arkeologi*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Arkeologi, Denpasar.

Sardesai. 1997. *Southeast Asia*, University of California, Los Angeles.

Staab, Christiane. 1997. *Balinesische Dorforganisationen und ihre Bewertungen in der Literatur*. Passau: Lherstuhl für Sudostasienkunde: Universität Passau.

Stuart-Fox. David J. 2010. *Pura Besakih: Pura, Agama dan Masyarakat Bali*. Jakarta:Pustaka Larasan, Udayana University Press, KITLV, BBPSNT Bali, NTB, NTT.

Stutterheim, W. F. 1929. *Oudheden van Bali. Vol. I. Het Oude Rijk van Pedjeng*. Singaradja-Bali, Uitgevern door de Kirtya Lieftrinck- van der Tuuk.

Timbul Haryono 2012, "Cultural Relation between India and Java: An Archeological Perspectives (Brief Outline)", in *International Seminar on "Cultural Exchange between India and Southeast Asian World"*, held by Udayana University in cooperation with Global Association of Indo-Asean Studies and Hankuk University of Foreign Studies, Korea, Denpasar 8-9 February.

Vickers, Adrian. 2012. *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Villiers, John. 1993. *Sudostasien vor der Kolonialzeit*. Frankfurt am Main/ Fischer Taschenbuch Verlag. Windia, Wayan. 2015. "Implementation of *Tri Hita Karana* Philosophy for the Sustainability of Subak Irrigation System in Bali, Indonesia", Paper Presented at ICCROM-CHA (Korea) Annual Conservation Forum 2015 in Bangkok. 14-16 December.

Windia, I Wayan. 2015a. "Religious Aspect in the System of Subak Irrigation, as A World Cultural Heritage in Bali", in *Bali Internship Field School: Towards Sustainable Cultural Landscape of Subak System*. Gianyar, 2nd—8th August.

Windia, I Wayan. 2015b. "Sistem Irigasi Subak dalam Kehidupan Masyarakat Bali", in *Bali Internship Field School: Towards Sustainable Cultural Landscape of Subak System*. Gianyar, 2nd—8th August.

Windia, I Wayan. 2004. "Harmoni Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata Menuju Bali Jagaditha", in *Menuju Bali Jagaditha* (Dharmaputra, ed.). Denpasar: Penerbit Bali Post.

Windia, I Wayan. 2002. *Transformasi Sistem Irigasi Subak yang Berlandaskan Tri Hita Karana*, (Unpublished Dissertation), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Windia, I Wayan. 1997. "Intervensi Pemerintah Terhadap Subak (Beberapa Catatan)", in I Gde Pitana (ed.), *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali: Sebuah Canangsari*. Denpasar: Upada Sastra.

CURRICULUM VITAE

I Ketut Ardhana is Professor of Asian History in the Faculty of Humanities Studies– Udayana University. He was the former Head of the Southeast Asia Division-Research Center for Regional Resources- the Indonesian Institute of Sciences, Jakarta (PSDR-LIPI), 2001-2009. His research project is on tourism and border studies in the Southeast Asian region, including: Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore and the Philippines. Previously he took the English course at the School of Oriental and African Studies, (SOAS) - University of London-England (1990), at the University of Belconnen in Canberra-Australia (1992), the Dutch course at Erasmus Huis, Universiteit te Leiden in the Netherlands (1990), and the German course at the Goethe Institute in Mannheim and at Passau University (UP) in Germany (1996-1997).

He studied history in the Faculty of Letters in the Department of History at Udayana University, Denpasar, Bali- and continued his studies to obtain the Drs. (Doctorandus Degree) at the Faculty of Letters – Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta in 1985. He graduated with his Master's Degree (Master of Arts in Asian Studies) at Southeast Asian Centre-Faculty of Asian Studies, the Australian National University (ANU) in Canberra, Australia in 1994. Then got his PhD degree or Dr. phil. (Doctor Philosophie) at *Sudostasienkunde, Philosophische Fakultät*, Universität Passau in Germany with the predicate *Magna Cum Laude* in 2000. He was granted a Fellowship to carry out research in area studies at the University of Passau in Passau- Germany in 2003 and also a Fellowship in the Centre for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Kyoto, Japan, in 2004.

He was a Committee member on the collaborative project between Indonesia and the Netherlands at NIOD (*Nederlandsch Instituut voor Oorlog Documentatie*) or the Dutch Institute for War Documentation) from 2004 until 2009. He has been a member of IFSSO (International Federation of Social Science Organizations) from 2003 until now and was elected as the first Vice President. In Seijo University in Tokyo, in 2015, he was elected as the second Vice President. He is also a founding member of the World SSH (World Social Sciences and Humanities) and presented his paper in Buenos Aires, Argentine, in 2010. He wrote an article on the "Review of *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: In cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation*" in the *Journal of Indonesia*, Vol. 91, 2011 published in Cornell, the US and one on "Early Harbours in Eastern Nusa Tenggara", in John N. Miksic and Goh Geok Yian, *Ancient Harbours in Southeast Asia: The Archaeology of Early Harbours and Evidence of Inter-Regional Trade* for the Bangkok SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archaeology and Fine Arts in 2013. He was appointed the Head of the Center for Bali Studies at Udayana University in Denpasar, Bali, in 2010, and later as

Public Inspiration

Jurnal Administrasi Publik

the Head of Postgraduate Program on Cultural Studies, Faculty of Social and Humanities Sciences at Udayana University, and the Director of the Widya Kerthi Foundation in 2017 a position he still holds.